

## **ANALISIS PENGARUH INVESTASI SWASTA, BELANJA INVESTASI PEMERINTAH DAERAH SERTA TINGKAT PENDIDIKAN TENAGA KERJA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**

### **Selamet**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Assholeh Pematang  
Email: selapematang59@gmail.com

### **Abstrak**

*Peran modal dan tenaga kerja guna proses pembangunan ekonomi di sebuah negara yang masih berkembang, Provinsi Jawa Tengah menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti serta dianalisis. Permasalahan yang dianalisis ialah pengembangan model untuk menganalisis factor-faktor, yang mencakup investasi baik dari pihak swasta (PMA dan PMDN) atau dari pemerintah (belanja investasi pemerintah daerah) serta tingkat pendidikan tenaga kerja yang sangat berpengaruh cukup signifikan pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh investasi swasta domestik/PMDN, investasi swasta asing/PMA, belanja pemerintah daerah, tenaga kerja yang berpendidikan tingkat dasar, tenaga kerja yang berpendidikan tingkat tengah serta tenaga kerja yang berpendidikan tingkat tinggi pada Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah mau itu dengan metode simultan atau dengan parsial. Hasil regresi linier berganda pada tingkat keyakinan  $\alpha = 5\%$ , variabel Investasi Swasta Domestik (PMDN), Belanja Investasi Pemda memiliki pengaruh cukup baik serta menunjukkan perubahan yang relevan pada proses tumbuhnya Ekonomi Jawa Tengah. Tetapi dalam hal ketenagagaga kerjaanpun yang memiliki tingkat pendidikan Tinggi memiliki pengaruh kurang baik dan relevan pada tahap perkembangan Ekonomi Jawa Tengah. Pegawai yang bekerja yang memiliki tingkat pendidikan Tinggi berpengaruh terhadap nilai Perkembangan Ekonomi di Jawa Tengah. Sementara Investasi Swasta Asing (PMA), pegawai kerja yang memiliki riwayat pendidikan tingkat Dasar dan Tenaga Kerja pendidikan tingkat tengah tidak memberikan pengaruh yang relevan pada Pertumbuhan Ekonomi. Sementara pada tingkat keyakinan  $\alpha = 10\%$  Tenaga Kerja yang memiliki tingkat pendidikan Menengah memiliki pengaruh yang cukup besar dan relevan pada perkembangan Ekonomi. Variabel Investasi Swasta Domestik (PMDN) jika mengalami peningkatan sebesar 1%, ceteris paribus, kemudian akan terus meningkatkan Perkembangan Ekonomi di Jawa Tengah sebanyak 0,37%, Belanja Investasi Pemerintah Daerah jika mengalami peningkatan sebesar 1%, ceteris paribus, akan pula menaikkan angka Perkembangan Ekonomi di Jawa Tengah mencapai 33,07%, serta Tenaga Kerja yang pendidikannya hingga tingkat Tinggi jika mengalami peningkatan sebesar 1%, ceteris paribus, maka akan menurunkan Perubahan perekonomian di Jawa Tengah hingga 5,34%. Investasi Swasta Asing (PMA) setiap peningkatan sebesar 1%, ceteris paribus, akan dilaksanakannya upaya*

Selamat

*peningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah sebesar 0,29%. Tenaga Kerja yang Berpendidikan Menengah setiap kenaikan Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah sebesar 1%, ceteris paribus, akan menyebabkan peningkatan kemajuan dalam sektor Ekonomi Jawa Tengah mencapai 8,51%. Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar setiap kenaikan Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar sebesar 1%, ceteris paribus, akan menyebabkan progress yang baik dalam sector ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,34%.*

**Kata Kunci :** *Pertumbuhan Ekonomi, PMDN, PMA, Belanja Investasi Pemda, tingkat pendidikan.*

### **Pendahuluan**

Pertumbuhan ekonomi ialah sebuah proses perubahan keadaan ekonomi sebuah negara secara berkaitan dengan sector lain menuju kondisi perekonomian yang signifikan naik dan tentunya lebih baik dalam satu periode. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai cara menaikannya muatan produksi sebuah perekonomian yang berbentuk tingginya pendapatan nasional suatu negara. Adanya pertumbuhan ekonomi ini adalah indikasi kesuksesan pembangunan ekonomi. Prof. Simon Kuznets (Jhingan, 2010) mengartikan pertumbuhan ekonomi ialah kemampuan suatu negara memfasilitasi pengadaan kebutuhan barang-barang ekonomi dalam kapasitas yang banyak dengan kurun waktu yang panjang untuk penduduknya. Kemampuan ini muncul berbarengan dengan kemajuan teknologi, penyesuaian kelembagaan, dan ideologi yang dibutuhkan.

Menurut Sukirno (2011) kemajuan dan progress dalam bidang ekonomi mempunyai pengertian masing-masing. Pertumbuhan ekonomi ialah proses naiknya output perkapita yang *continue* dalam waktu yang relative lama. Pertumbuhan ekonomi tersebut adalah salah satu indikator suksesnya sebuah pembangunan. Terdapat empat faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi pada tiap-tiap negara yakni 1) kekayaan yang bersumber dari alam serta tanahnya (SDA), 2) Barang-barang modal dan tingkat teknologi yang mencakup semua investasi baru dalam lahan, peralatan fisik dengan kemajuan teknologi, 3) Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja melalui peningkatan kesehatan, pendidikan dan keterampilan kerja, pertumbuhan populasi yang akhirnya menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja, 4) Sistem sosial dan masyarakat menunjukkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sejauh apa yang sudah tercapai, seperti sikap berhemat yang bertujuan untuk melakukan investasi, sikap bekerja keras dan sebagainya. Hal tersebut sesuai dengan teori ekonomi neo klasik yang

menjadi titik fokusnya adalah permodaanl dan ketenagakerjaan kemudian semakin majunya teknologi sebagai sebuah unsur baru.

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah Alat ukur yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara. PDB mengukur aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian dalam suatu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi erat kaitannya dengan tahapan meningkatnya produksi barang dan jasa pada kegiatan ekonomi masyarakat. Untuk mengetahui ukuran pertumbuhan ekonomi, nilai PDB yang dasar pada harga konstan (Pangka pertumbuhan yang diperoleh adalah pertumbuhan *rill* yang terjadi karena adanya penambahan produksi (Mankiw, 2007).

Pembangunan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah hingga saat ini yang menyeluruh dan menaikkan perekonomian masyarakatnya. Hasil-hasil yang dicapai pada pembangunan dapat dirasakan masyarakat yang mana masyarakat adalah komposit pembangunan dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang tentunya tidak lepas dari peran dan jasasama yang dibangun antara pemerintah dan masyarakat. Namun masih terdapat beberapa kendala yang mengalangi dalam memaksimalkan kekuatan sumber daya sosial manusia serta sumber modal yang selalu ditemukan oleh pembuat kebijakan di tahapan Provinsi maupun di kabupaten/kota.

Berdasarkan Tabel 1, jika dilihat dari pertumbuhan ekonominya sebagaimana terlihat pada tabel 1, selama periode 2009-2013 pada umumnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah juga tergolong berada dibawah apabila berbanding dengan Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur.

**Tabel 1.**  
**Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2000 Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2009-2013 (%)**

Provinsi	2009	2010	2011	2012*	2013**	Rata-rata
DKI Jakarta	5,02	6,49	6,72	6,54	6,11	6,14
Jawa Barat	4,19	6,20	6,49	6,21	6,15	5,78
Jawa Tengah	5,14	5,83	6,04	6,30	5,83	5,81
DI. Yogyakarta	4,43	4,48	5,24	5,43	5,58	5,01
Jawa Timur	5,01	6,67	7,22	7,28	6,53	6,48
Banten	4,09	6,11	6,32	6,16	5,90	5,65

*Sumber: Statistik Indonesia 2014, BPS Jawa Tengah, diolah*

Pada periode tersebut dapat diketahui bahwasannya angka rata-rata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tingkat perubahannya tidak signifikan berbeda

Selamat

dengan angka laju pertumbuhan ekonomi provinsi lain di Pulau Jawa. Hal ini mencirikan bahwasanya Provinsi Jawa Tengah mempunyai potensi untuk memajukan yang menjadi kekuatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), sumber permodalan mereka, serta harapan kedepannya Provinsi Jawa Tengah menyimpan kekuatan untuk menjadi setara dengan Provinsi lain di Pulau Jawa khususnya Provinsi DKI Jakarta, dan Provinsi Jawa Timur.

Pergerakan laju ekonomi yang relative lambat disebabkan oleh faktor internal yakni belum maksimalnya kapasitas sektor industri dalam hal produksi dan pengolahan penyebab eksternal lainnya adalah masih bergantungnya masyarakat pada sektor pertanian. Pembangunan kabupaten/kota yang positif diraih oleh sektor industri karena memiliki tingkat kontribusi tertinggi di PDRB Provinsi Jawa Tengah maka mendorong pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kualitas fasilitas yang mendukung guna menunjang pertumbuhan sektor industri tersebut. Terutama dalam bidang industri dikenal sebagai sektor pemimpin yang memiliki keterkaitan dalam perekonomian dengan sektor – sektor lain seperti bidang pertanian sebagai bahan bakunya, bidang transportasi sebagai alat distribusi, serta sektor jasa keuangan sebagai sarana modalan sebuah industri, dan sebagainya.

Partisipasi yang diberikan oleh Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah dalam waktu satu periode yakni dari tahun 2009-2013, setiap daerah mempunyai value PDRB yang beragam karena setiap daerah punya ciri khas yang berbeda. Dan Kota Semarang memberikan kontribusi tertinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah dengan keumuman PDRB sebesar Rp.22,84 triliun (13,81%) kemudian Kabupaten Cilacap sebesar Rp.13,78 triliun (8,34%) dan Kabupaten Kudus sebesar Rp.13,23 triliun (8,02%) dan kontribusi paling rendah ialah Kota Salatiga dengan rata-rata PDRB sebesar Rp.968 miliar (0,59%).

Kenaikan perkembangan ekonomi Provinsi Jawa Tengah, pastinya tidak jauh dari peran para investor yang berinvestasi di wilayah tersebut. Investasi atau penanaman modal oleh investor local atau dalam negeri (PMDN) atau investor pihak asing (PMA) di Provinsi Jawa Tengah, dapat dilihat dari nilai realisasi investasi maupun persentase laju investasi yang terjadi ditunjukkan Tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Realisasi dan Persentase Laju Pertumbuhan Investasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013**

Tahun	PMDN		PMA	
	Investasi (Miliar Rp)	Pertumbuhan (%)	Investasi (Juta US \$)	Pertumbuhan (%)
2008	1.336,3		39,48	
2009	2.579,0	92,99	1.935,00	4800,12
2010	2.825,4	9,55	793,84	-58,97
2011	4.839,8	71,30	1.588,51	100,10
2012	1.634,0	-66,24	1.391,14	-12,43
2013	859,1	-47,42	1.568,37	12,74

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2014, BPS Jawa Tengah, diolah

Berdasarkan Tabel 4.2, Pendanaan Modal Asing (PMA) dan Pendanaan Modal Dalam Negeri (PMDN) selama periode 2008-2013 berfluktuasi. Realisasi PMDN di Provinsi Jawa Tengah terus naik sejak tahun 2008 sebesar Rp.1,3 triliun menjadi Rp.4,8 triliun di tahun 2011, lalu pada tahun 2012 PMDN turun menjadi Rp.1,6 triliun (-66%) dan kembali turun di tahun 2013 sebesar Rp.859 miliar (-47%). Sedangkan, keadaan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) periode 2009-2013 juga mengalami naik turun. Tahun 2009, PMA terjadi kenaikan sebesar \$1,9 juta (4800%) dari yang awalnya \$39 ribu di tahun 2008. Kemudian pada tahun 2010, PMA turun sebesar 58% menjadi \$793 ribu dan kembali naik hingga tahun 2013 sebesar \$1,6 juta. Naik turunnya realisasi PMA dan PMDN selama periode 2009-2013, hal ini terjadi karena para investor yang belum memberikan kepercayaannya untuk melakukan investasi di Provinsi Jawa Tengah dengan alasan kondisi perekonomian, sosial, politik, dan keamanan yang kurang stabil.

Keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari bantuan pusat dan Pendapatan Asli Daerah adalah bentuk dari akumulasi modal pemerintah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Strategi peranan dari investasi pemerintah ini, memiliki sasaran penggunaannya guna untuk membiayai pembangunan dibidang sarana dan prasarana yang mampu menunjang lancarnya usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

**Tabel 3.**  
**Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2013**

No.	URAIAN	Proporsi (%)				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	61,77	63,61	68,10	74,61	72.41
1.1	Belanja Pegawai	18,11	17,92	15,14	10,85	10.75
1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	
1.3	Belanja Hibah	1,31	1,14	1,34	27,29	27.50
1.4	Belanja Bantuan Sosial	7,72	5,78	4,94	0,07	0.11
1.5	Belanja Bagi Hasil	21,33	19,82	21,79	19,69	19.67
1.6	Belanja Bantuan Keuangan	13,21	18,70	24,85	16,67	14.35
1.7	Belanja Tidak Terduga	0,10	0,25	0,04	0,05	0.02
2	BELANJA LANGSUNG	38,23	36,39	31,90	25,39	27.59
2.1	Belanja Pegawai	4,11	3,52	2,62	2,78	2.93
2.2	Belanja Barang dan Jasa	23,60	25,84	23,30	17,28	16.84
2.3	Belanja Modal	10,52	7,03	5,97	5,34	7.82
	Jumlah	100	100	100	100	100.

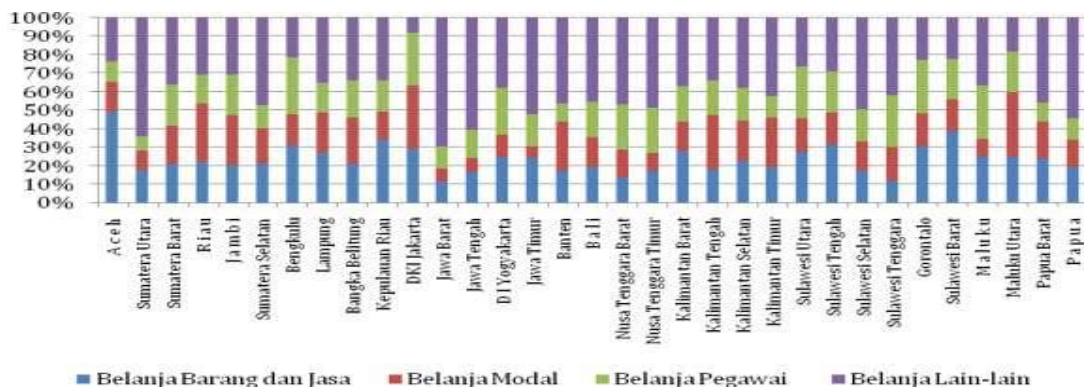
Sumber: *Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 2013*

Penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah umumnya adalah bentuk pembangunan dan pemeliharaan prasarana umum dan sifatnya *non excludable* dan atau *non rivalry* yang peranannya tidak tergantikan dibandingkan dengan peran perusahaan swasta. Peran pemerintah sangat penting khususnya daerah-daerah yang relatif tertinggal, yang tingkat investasi swasta masih sangat lemah dan rendah. Pada wilayah tersebut investasi pemerintah dapat dijadikan sebagai upaya meningkatkan daya tarik wilayah melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, irigasi, dan prasarana transportasi lainnya, serta peningkatan sumber daya manusia (SDM). Tanpa hal tersebut sangat sulit dijadikan harapan dunia usaha yang ada di daerah dapat maju dan berkembang.

Komitmen pemerintah daerah yang akan mengutamakan penanaman modal publik bisa tampak dari rasio belanja modal pemerintah daerah pada total belanja pemerintah kabupaten/kota dan provinsi di Jawa Tengah. Pada tahun 2013 rasio belanja modal di Jawa Tengah sebanyak 7,82 persen dan rasio belanja pegawai sebesar 15,19 persen. Kedepannya harus adanya perbaikan komposisi belanja pemerintah daerah ini yang lebih menjurus pada belanja modal. Belanja modal mempunyai efek secara

Analisis Pengaruh Investasi Swasta, Belanja Investasi Pemerintah Daerah dan Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

langsung dan relatif besar pada perekonomian. Meskipun secara umum porsi investasi pemerintah lebih kecil dibandingkan investasi swasta, tetapi perannya tidak tergantikan dalam perumbuhan ekonomi. Pembangunan fasilitas umum seperti jalan, saluran irigasi, dan jaringan listrik secara pasti membutuhkan perhatian pemerintah. Peranan investasi pemerintah sangat terasa manfaatnya pada wilayah-wilayah yang tingkat investasi swastanya relatif rendah. Investasi pemerintah dalam konteks ini berguna untuk perintis dan pembuka jalan bagi masuknya investasi swasta.



Sumber : Statistik Indonesia, BPS 2013

Gambar 1. Komposisi Belanja Pemerintah Daerah 2013

Penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama kurun waktu 2010-2013, sektor pertanian memberikan kontribusi paling tinggi dan diikuti sektor perdagangan dan sektor industri. Namun jika dilihat perkembangan tiap tahun, sektor pertanian selama 2010-2013 terus mengalami penurunan dari Tahun 2010 sebanyak 5,86 juta orang dan pada Tahun 2013 menjadi sebanyak 5,06 juta orang.

Penyerapan tenaga kerja selama kurun waktu 2010-2013 masih didominasi oleh penduduk yang berpendidikan rendah, yaitu Sekolah Dasar ke bawah dan Sekolah Menengah Pertama. Namun upaya peningkatkan kualitas tenaga kerja dicirikan dengan adanya kecenderungan meningkatnya tenaga kerja yang berpendidikan tingkat tinggi dari 0,87 juta orang pada Tahun 2010 meningkat menjadi 1,08 juta orang pada Tahun 2013, sebagaimana data pada Tabel 4.

**Tabel 4.**  
**Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 – 2013**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (juta orang)	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
SD ke Bawah	9,46	8,41	9,14	9,01

Selamet

Sekolah Menengah Pertama	2,89	2,85	3,05	3,06
Sekolah Menengah Atas	2,61	3,61	2,81	2,98
Diploma I/II/III dan Universitas	0,87	0,94	0,92	1,08

*Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014*

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah pada suatu periode mengalami fluktuasi dan berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi lain di Jawa. Masalah yang menarik untuk dikaji mengingat sumber daya alam, fasilitas penunjang cukup sama dengan Provinsi lain, bahkan letak Provinsi Jateng yang berada di tengah dinilai cukup strategis.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dilakukan pengkajian ilmiah pada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang dianalisis adalah Investasi Swasta (PMA & PMDN), Belanja Investasi Pemerintah Daerah dan Tenaga Kerja dalam hal ini adalah tingkat pendidikan tenaga kerja.

### **Metode Penelitian**

Pengambilan data penelitian dilakukan dengan studi pustaka yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen atau data yang dibutuhkan kemudian dicatat dan dilakukan olah data.

Sedangkan penanaman modal asing adalah sebuah aktivitas menanam modal atau berinvestasi untuk melakukan usaha di wilayah-wilayah dalam suatu negara yang dilakukan oleh investor, dengan menggunakan modal asing sepenuhnya ataupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri, bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan daya saing dunia usaha dalam negeri, meningkatkan kapasitas dan kecanggihan dalam teknologi nasional, mendorong pengembangan ekonom kerakyatan, mengelola ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memberdayakan dana yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri serta mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

### **Hasil dan Pembahasan**



## 1. Pengaruh investasi swasta domestik /PMDN ( $K_1$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Nilai koefisien regresi sebesar 0,0037 yang artinya bahwa setiap peningkatan investasi swasta domestik /PMDN ( $K_1$ ) sebesar 1 persen maka akan menyebabkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0037 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

Dari hasil perhitungan regresi data panel yang dilakukan pada periode 2010-2014, variabel investasi swasta domestik /PMDN ( $K_1$ ) memiliki tanda positif, artinya semakin besar peningkatan investasi swasta domestik /PMDN ( $K_1$ ) akan semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi swasta domestik/PMDN memiliki pengaruh positif, artinya semakin tinggi pertumbuhan investasi akan semakin menaikkan pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis yang menyatakan bahwa investasi swasta domestik /PMDN ( $K_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh Investasi Swasta Domestik /PMDN ( $K_1$ ).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Sofwin Hardiati (2002) Dalam penelitiannya tentang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jateng dengan menggunakan data runtut waktu Provinsi. Jateng selama tahun 1980-2001 menyebutkan bahwa Investasi Swasta Domestik/PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

## 2. Pengaruh investasi swasta asing ( $K_2$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Nilai koefisien regresi sebesar 0,0029 yang artinya bahwa setiap peningkatan investasi swasta asing/PMA ( $K_2$ ) sebesar 1 persen maka akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,0029 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

Hipotesis yang menyatakan bahwa investasi swasta asing /PMA ( $K_2$ ) berpengaruh positif tetapi akan secara parsial tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini diduga disebabkan :

- a) Pasar domestik/daerah yang kecil sehingga menyebabkan *rate of return* dari modal rendah dan kurang tersedianya fasilitas pendukung seperti transportasi, tenaga kerja terampil, dan teknologi.

Selamat

- b) Masih minimnya informasi tentang sumber-sumber dana dari sektor perbankan yang bisa dimanfaatkan guna mendukung pembiayaan proyek.
- c) Masih rendah kualitas dan produktivitas sumber daya manusia sehingga rencana alih teknologi belum terlaksana dengan baik, serta terjadinya persaingan yang semakin ketat dalam menarik investasi asing oleh negara maju maupun negara berkembang
- d) Pemilik PMA adalah orang asing sehingga *value added* dari investasi ini banyak kembali ke negara asalnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Hasil penelitian Bambang Kustitunto dan Istikomah (1999) “*Peranan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*” menunjukkan bahwa investasi asing tidak berpengaruh pada proses pertumbuhan ekonomi di Indonesia..

### **3. Pengaruh Belanja Investasi Pemerintah Daerah (K<sub>3</sub>) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Nilai koefisien regresi sebesar 0,3306 yang artinya bahwa setiap peningkatan Belanja Investasi Pemerintah Daerah (K<sub>3</sub>) sebesar 1 persen maka akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3306 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

Teori pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave dalam Dumairy (1996) dan Mangkusoebroto (1998) adalah sebuah pandangan yang didasarkan pada analisis yang dilakukan di beberapa negara, namun tidak berdasar pada sebuah teori tertentu. Umumnya Rostow dan Musgrave mengaitkan pengeluaran pemerintah dengan tiga buah proses pembangunan ekonomi yakni tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut.

Pada tahap awal pemerintah melakukan investas adalah bagian yang terbesar dari total investasi yang ada. Pengeluaran investasi tersebut bertujuan untuk pengadaan sarana maupun fasilitas umum seperti transportasi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Pada tahap menengah investasi dari swasta mulai berkembang tetapi pemerintah masih tetap memegang peranan besar guna memacu pertumbuhan agar dapat lepas landas. Selain harus mengatasi kegagalan pasar yang terjadi, pemerintah juga harus menyediakan barang publik dalam jumlah yang lebih banyak dengan

kualitas yang lebih baik. Perkembangan ekonomi pada tahap ini menyebabkan hubungan antar sektor yang semakin kompleks. Rasio investasi total terhadap pendapatan nasional semakin besar, tetapi rasio investasi pemerintah terhadap pendapatan nasional akan semakin mengecil.

Pada tahap lanjut, kegiatan pemerintah dalam tahanan pembangunan ekonomi berpindah dari penyediaan sarana prasarana ke pengeluaran demi menaikkan kesejahteraan sosial masyarakat seperti adanya program kesehatan, jaminan hari tua dan sebagainya. Pada intinya, teori Rostow dan Musgrave ini membagi pembangunan ekonomi dalam beberapa tahapan. Keterlibatan dan peran serta pemerintah semakin lama semakin berkurang sejalan dengan meningkatnya tahapan yang dilewati.

Ini sejalan dengan hasil penelitian Arief Hadiono (2001) tentang pertumbuhan ekonomi di propinsi Jawa Tengah menggunakan data polling sampel populasi kabupaten/kota di Jateng selama tahun 1994-1998 menyebutkan bahwa output suatu daerah (PDRB) salah satunya adalah fungsi dari investasi pemerintah mempunyai pengaruh positif dan signifikan.

#### **4. Pengaruh Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar ( $L_1$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Nilai koefisien regresi sebesar -0,019841 yang artinya bahwa setiap peningkatan Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar ( $L_1$ ) sebesar 1 persen maka akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar -0,019841 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

Dari hasil perhitungan regresi data panel yang dilakukan pada periode 2010-2014, hipotesis variabel Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar ( $L_1$ ) di Provinsi Jawa Tengah memiliki tanda negatif dan tidak signifikan yang berarti bahwa kenaikan jumlah tenaga kerja berpendidikan dasar justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi secara tidak signifikan pengaruhnya.

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Maulana (2013) menyatakan, tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini diduga oleh kualitas dari tenaga kerja yang dimiliki, walaupun jumlah tenaga kerja berlimpah tidak dipungkiri akan berdampak pada berkurangnya kualitas dan kuantitas barang atau jasa yang nantinya akan dihasilkan jika kualitas tenaga kerja

Selamat

yang digunakan tidak memadai. Tenaga kerja tidak saja penting dari segi kuantitas, tetapi yang tidak kalah penting adalah kualitasnya. Peningkatan kualitas SDM tenaga kerja bisa dengan cara memberi pendidikan formal maupun non formal, dan dapat saja diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta.

## **5. Pengaruh Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah ( $L_2$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Nilai koefisien regresi sebesar 0,085067 yang artinya bahwa setiap peningkatan Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah ( $L_2$ ) sebesar 1 persen maka akan menyebabkan kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,085067 persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

Dari hasil perhitungan regresi data panel yang dilakukan pada periode 2010-2014, hipotesis variabel Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah ( $L_2$ ) memiliki tanda positif dan tidak signifikan pada  $\alpha = 5\%$  artinya secara parsial memiliki pengaruh yang meningkat namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ini sejalan dengan penelitian Maulana (2013) menyatakan, tenaga kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan juga penelitian Eko Wicaksono Pambudi (2013), Variabel *human capital investment* dalam pendidikan menunjukkan hasil positif namun tidak signifikan dengan pertumbuhan ekonomi.

Akan tetapi nilai probabilitas variabel Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah ( $L_2$ ) sebesar 0,055 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi  $\alpha = 10\%$  yang berarti ini berpengaruh signifikan pada  $\alpha = 10\%$ . Hal ini diduga bahwa lapangan pekerjaan di Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh tenaga kerja berpendidikan menengah yang secara kualitasnya lebih sesuai dengan sektor-sektor produksi yang dihasilkan sebagai penyumbang PDRB.

Seperti penelitian yang dilakukan Suryanto (2011) dan Novianto (2012) mengungkapkan bahwa, tenaga kerja mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin tinggi tenaga kerja di suatu daerah, semakin tinggi pula produksi yang akan dihasilkan sehingga dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Tenaga kerja dengan rata-rata lulusan pendidikan menengah merupakan tenaga kerja yang memiliki *skill* ahli dan dibutuhkan cukup banyak guna penunjang

pembangunan ekonomi, manajer tingkat menengah pada perusahaan, merupakan tulang punggung administrasi perusahaan.

## **6. Pengaruh Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi ( $L_3$ ) terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Nilai koefisien regresi sebesar  $-0,053403$  yang artinya bahwa setiap peningkatan Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi ( $L_3$ ) sebesar 1 persen maka akan menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi sebesar  $-0,053403$  persen dengan asumsi variabel lain tetap (*ceteris paribus*).

Dari hasil perhitungan regresi data panel yang dilakukan pada periode 2010-2014, hipotesis variabel Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi ( $L_3$ ) memiliki tanda negatif dan signifikan artinya secara parsial memiliki pengaruh yang negatif.

## **Kesimpulan**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh investasi swasta domestik/PMDN ( $K_1$ ), investasi swasta asing/PMA ( $K_2$ ), Belanja Investasi Pemerintah Daerah ( $K_3$ ), Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar ( $L_1$ ), Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah ( $L_2$ ) dan Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi ( $L_3$ ) terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2010-2014.

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Investasi Swasta Domestik/PMDN mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Investasi Swasta Asing/PMA tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Belanja Investasi Pemerintah Daerah.
- Mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar ( $L_1$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah ( $L_2$ ) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa

Selamat

Tengah

- Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi (L<sub>3</sub>) mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- Investasi Swasta Domestik (PMDN), Investasi Swasta Asing (PMA), Belanja Investasi Pemerintah daerah Tenaga Kerja Berpendidikan Dasar, Tenaga Kerja Berpendidikan Menengah dan Tenaga Kerja Berpendidikan Tinggi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

## BLIBIOGRAFI

- Abimanyu, Anggito. 2005. *Format Anggaran Terpadu Menghilangkan Tumpang Tindih*. Bapekki Depkeu, Jakarta
- Agus, Widarjono. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Ekonesia.
- Alkadri. 1999. *Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*, Jurnal Pusat Studi Indonesia, Universitas Terbuka
- Arndt, H. W., (ed). 1998. *Pembangunan dan Pemerataan Indonesia di Masa Orde Baru*. Jakarta : LP3ES.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 4 Cetakan kedua, Yogyakarta, Penerbit Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Ardito Bhinadi, 2001 “*Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Regional di Indonesia*”, (2002), Tesis. Program Studi Magister Sains Universitas Gadjah Mada
- A, Sudjana M. 2002. *Metoda Statistika*, PT.Tarsito, Bandung.
- Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Rekapitulasi Realisasi dan Laju Pertumbuhan Investasi Berbagai Tahun Terbitan*. Jawa Tengah.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia*. Indonesia
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Berbagai Tahun Terbitan, Jawa Tengah Dalam Angka, BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Bambang Kustituantio dan Istiqomah. 1999 “*Peranan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*”. Universitas Gadjah Mada. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol.14, No. 2, Hal. 1-13
- Basuki. 1997. *Kajian Mengenai Pengaruh Penanaman Modal Asing Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tabungan Domestik Indonesia Tahun 1969-1994*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.12,2,50-65, Universitas Gajah Mada.
- Becker, G.S. 1993. *Human Capital : A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. The University of Chicago Press. Chicago.

Selamat

- Boediono, 1998. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE, Yogyakarta
- Datrini, Luh Kade. 2009. “Dampak Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali”. *Jurnal Sarathi Vol.16 No.3 Oktober 2009*. Denpasar. Fakultas Ekonomi UNWAR
- DJohadikusumo, Sumitro. 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.
- Dornbusch, Rudiger. Et al. 2004. *Makro Ekonomi*. PT Media Global Edukasi. Jakarta.
- Dumairy. 1996. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Fisher, Stanly dan Richar Stardz. 2008. *Makro Ekonomi*. Mc Graw Hill. Media Global Education. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Glasson, Jhon. 1997. *Pengantar Perencanaan Regional*, diterjemahkan Paul Sitohang, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Gunadi Brata. Aloysius. 2004. *Analisis Hubungan Imbal Balik Antara Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Daerah Tk.II di Indonesia*. Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Gujarati, Damodar N. 2009. *Basic Econometrics*, New York : McGraw-Hill.
- Hadiono, Arief, Kustitunto Bambang, 2001, *Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*, <http://repository.ugm.ac.id/40067/>
- Hardiati, Sofwin. 2002. *Analisis Pengaruh Ffaktor Modal dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi Jawa Tengah*, Tesis S-2 MIESP UNDIP Semarang (tidak dipublikasikan).
- Hariyanto, Ronald. 2006. “Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Propinsi Jawa Tengah Periode 2000-2002”. Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Hidayat, Muhammad, Lapeti Sari dan Nobel Aqualdo. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekanbaru*. Fakultas Ekonomi Universitas Riau. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Tahun II Nomor 4.
- Hill, H. And H.W. Arndt. 1998. *Southeast Asia's Economic Crisis*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.



Analisis Pengaruh Investasi Swasta, Belanja Investasi Pemerintah Daerah dan Tingkat Pendidikan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi

<http://djpk.depkeu.go.id>

Irawan dan M. Suparmoko. 2003. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : BPFE

Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin. 2005. *Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*